

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Konsep Pemberdayaan

2.1.1.1 Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan konsep yang berkaitan dengan kekuasaan (*power*). Istilah kekuasaan seringkali identik dengan kemampuan individu untuk membuat dirinya atau pihak lain melakukan apa yang di inginkan. Kemampuan tersebut baik untuk mengatur dirinya, mengatur orang lain sebagai individu atau kelompok atau organisasi, terlepas dari kebutuhan, potensi, atau keinginan orang lain. Dengan kata lain, kekuasaan menjadikan orang lain sebagai objek dari pengaruh atau keinginan dirinya.

Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya atau kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*), dan mengurangi kekuasaan (*disempower*) kepada pihak yang terlalu berkuasa (*powerfull*) sehingga terjadi keseimbangan (Djohani, 2003 dalam Anwas 2012, hlm.49).

Menurut Suharto dalam Edi Suharto (2014, hlm. 58) mengemukakan bahwa definisi pemberdayaan dilihat dari segi proses, tujuan, dan cara-cara pemberdayaan, yaitu:

- a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang – orang yang tidak beruntung atau lemah (Ife, 1995)
- b. Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi dalam kehidupannya.
- c. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial (swift, dan levin, 1984)
- d. Pemberdayaan merupakan suatu cara rakyat, komunitas, organisasi di arahkan agar mampu berkuasa atas kehidupannya (Rappaport, 1984).

Pemberdayaan merupakan sebuah proses tujuan, dimana tujuan itu ingin meningkatkan kekuasaan yang lemah menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi

dalam berbagai pengontrolan terhadap kejadian- kejadian serta lembaga-lembaga yang berpengaruh dalam kehidupannya. Pemberdayaan merupakan suatu cara agar rakyat mampu berkuasa atas kehidupannya.

Lilis Karwati (2017, hlm. 46) mengemukakan bahwa konsep pemberdayaan merupakan sebuah upaya yang bertujuan untuk menjadikan suatu yang adil serta beradab jadi lebih efisien dalam hal segala aspek kehidupan. Pemberdayaan dikaitkan dengan upaya mengangkat eksistensi diri seseorang atau kelompok dalam masyarakat dari posisi yang kurang beruntung menjadi lebih mampu mengembangkan diri dengan sebaik-baiknya. Pada saat yang sama, pemberdayaan perempuan lebih terkait dengan peningkatan kualitas partisipasi perempuan dibidang pekerjaan yang di tekuni.

Sedangkan menurut Djohani Rianingsih (2003). Pengertian pemberdayaan adalah proses pengembangan hubungan yang lebih setara, adil, dan tanpa dominasi disuatu komunitas. Pemberdayaan memerlukan proses penyadaran kritis masyarakat tentang hak-hak dan kewajibannya. Pemberdayaan juga memerlukan proses pengembangan kepemimpinan lokal yang egaliter dan memiliki legitimasi pada rakyatnya.

Menurut pranarka dan Muljarto (1996), berpendapat bahwa pemberdayaan adalah suatu proses dan upaya untuk membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, pemerintah, negara, dan data nilai dalam kerangka proses aktualisasi, yang terwujud di berbagai kehidupan politik, hukum, pendidikan, dan sebagainya. Pemberdayaan juga memiliki makna menghidupkan kembali tatanan nilai, budaya, dan kearifan lokal dalam membangun jati dirinya sebagai individu dan masyarakat.

Slamet (2003), menekankan bahwa hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu dalam membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya. Istilah mampu disini mengandung makna: berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu sebagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani

mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertindak sesuai inisiatif.

Pemberdayaan memiliki makna: dorongan atau motivasi, bimbingan, atau pendampingan dalam meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk mampu mandiri. Upaya tersebut merupakan sebuah tahapan dari proses pemberdayaan dalam mengubah perilaku, mengubah kebiasaan lama, menuju perilaku yang lebih baik, dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraanya.

Khan (1992, hlm.4) dalam Bakri (2017, hlm.18) mengemukakan bahwa pemberdayaan merupakan konsep untuk membangun masyarakat dalam meningkatkan kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah. Sedangkan menurut Byars dan Rue (1997) dalam Bakri (2017, hlm.19) mengemukakan bahwa pemberdayaan merupakan suatu bentuk desentralisasi yang melibatkan masyarakat untuk meningkatkan tanggung jawab dalam membuat keputusan.

Dari kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan konsep dimana tujuannya untuk membangun masyarakat dalam meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dan meningkatkan rasa tanggung jawab dalam mengambil keputusan.

Menurut Bakri (2017, hlm.19) pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya memiliki dua makna pokok, yaitu :

- a. Meningkatkan kemampuan masyarakat (*to give ability or enable*) melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan agar kondisi kehidupan masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang di harapkan.
- b. Meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pemberian wewenang secara proposional kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan (*to give authority*) dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat memungkinkan dan memandirikan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat sebagai suatu strategi dalam pembangunan berorientasi pada pemberian kesempatan kepada setiap anggota masyarakat untuk

dapat ikut serta dalam proses pembangunan dengan mendapatkan kesempatan yang sama dan dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara proporsional.

Dengan demikian, konsep pemberdayaan bukan hanya menyangkut persoalan ekonomi tetapi merupakan konsep yang menyangkut semua aspek kehidupan. Semua aspek kehidupan itu haruslah diberdayakan secara bersamaan dan integrative dan pemberdayaan ekonomi harus pula disertai dengan pemberdayaan social budaya dan politik, begitu pula sebaiknya.

2.1.1.2 Indikator Pemberdayaan

Kajian-kajian konseptual tentang pemberdayaan menyajikan banyak indikator keberdayaan. Empat diantaranya menyangkut derajat keberdayaan. Menurut Suharto (2005) Indikator pemberdayaan paling tidak memiliki empat hak, yaitu :

- a. Kekuasaan dalam (*power within*) meningkatkan kesadaran dan keinginan untuk berubah dalam kemampuan ekonomi seperti evaluasi yang positif terhadap kontribusi ekonomi diri, keinginan memiliki kesempatan setara dalam ekonomi dan keinginan dalam hal memiliki kesamaan hak terhadap sumber yang ada pada rumah tangga dan pada masyarakat. Kemudian kemampuan dalam mengakses manfaat kesejahteraan seperti kepercayaan diri dan kebahagiaan, keinginan dalam memiliki kesetaraan kesejahteraan, keinginan dalam membuat keputusan, mengenai diri sendiri dan orang lain, dan keinginan untuk mengontrol jumlah anak. Kemudian kemampuan cultural dan politis dalam *assertiveness* dan otonomi, keinginan menghadapi subordinasi gender, keinginan ingin terlibat dalam proses budaya, hukum dan politik.
- b. Kekuasaan untuk (*power to*) meningkatkan kemampuan individu untuk berubah, dan meningkatkan individu untuk mendapatkan akses dalam keahlian ekonomi akses terhadap pelayanan keuangan mikro, akses terhadap pemasukan, akses terhadap aset-aset produktif serta kepemilikan dan dalam rumah tangga, akses terhadap rumah pasar serta penyusutan beban dalam pekerjaan dalam negeri. Setelah itu keahlian mengakses arti kesejahteraan dalam keterampilan, status kesehatan serta gizi, pemahaman menimpa akses pelayanan kesehatan reproduksi serta ketersediaan pelayanan kesehatan kesejahteraan publik. Serta keterampilan cultural, politis dan mobilitas serta akses terhadap dunia luar,

pengetahuan menimpa proses hukum, politik serta kebudayaan dan keterampilan menghadapi hambatan formal.

- c. Kekuasaan untuk (*power over*) mampu mengakses hambatan serta kekuasaan pada jenjang rumah tangga, warga dan makro, kekuasaan ataupun asksi mengalami hambatan dalam keahlian ekonomi ialah control atas peninggalan kepemilikan serta alokasi tenaga kerja, kegiatan orang mendapati deskriminasi. Sesudah itu dalam segi keahlian mengakses keahlian serta kesejahteraan ialah control atas dimensi mengkonsumsi pada keluarga serta aksi orang buat memepertahankan diri dari kekerasan keluarga. Setelah itu keahlian dalam cultural politis ialah aksi orang dalam mengalami, mengganti anggapan budaya hak perempuan pada tingkatan keluarga serta warga, keterlibatan orang serta pengambilan kedudukan dalam proses budaya, hukum serta politik.
- d. Kekuasaan dengan (*power within*) adanya kerja sama bersama orang lain untuk mendapati hambatan sumber serta kekuasaan pada tingkatan keluarga dalam keahlian ekonomi ialah berperan selaku model peranan untuk orang lain dalam pekerjaan, sanggup mengalami deskriminasi pada akses sumber. Setelah itu keahlian dalam mengakses arti kesejahteraan ialah penghargaan besar terhadap kenaikan serta pengeluaran, serta aksi bersama buat tingkatan kesejahteraan publik. Serta keaslian terhadap cultural serta politis ialah jaringan untuk mendapatkan sokongan, kegiatan untuk membela orang lainserta partisipasi dalam gerakan-gerakan mengalami subordinasi gender bertabiat kultural, politik dan hukum pada masyarakat.

2.1.1.3 Prinsip Pemberdayaan

Dahama dan Bhatnagar (1980) dalam Totok Mardikanto (2019 hlm, 106) mengungkapkan prinsip pemberdayaan yang mencangkup:

- 1) Minat dan kebutuhan, artinya pemberdayaan akan efektif jika selalu mengacu pada minat dan kebutuhan masyarakat.
- 2) Organisasi masyarakat bawah, artinya pemberdayaan akan efektif jika mampu melibatkan/ menyentuh organisasi masyarakat bawah, sejak dari setiap keluarga/ kekerabatan.

- 3) Keragaman budaya, artinya pemberdayaan harus memperhatikan adanya keragaman budaya.
- 4) Perubahan budaya, artinya setiap kegiatan pemberdayaan akan mengakibatkan perubahan budaya.
- 5) Kerjasama dan partisipasi, artinya pemberdayaan hanya akan efektif jika mampu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk selalu bekerja sama dalam melaksanakan program-program pemberdayaan yang telah dirancang.
- 6) Demokrasi dalam penerapan ilmu, artinya dalam pemberdayaan harus selalu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menawar setiap ilmu alternatif yang ingi di terapkan.
- 7) Belajar sambil kerja, artinya dalam kegiatan pemberdayaan harus diupayakan agar masyarakat dapat belajar sambil kerja atau belajar dari pengalaman tentang segala sesuatu yang ia kerjakan.
- 8) Penggunaan metoda yang sesuai, artinya pemberdayaan harus dilakukan dengan penerapan metoda yang selalu disesuaikan dengan kondisi sarannya.
- 9) Kepemimpinan, artinya penyuluh tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya bertujuan untuk kepentingan/ kepuasan sendiri dan harus mampu mengembangkan kepemimpinan.
- 10) Spesialis yang terlatih, artinya penyuluh harus benar - benar pribadi yang telah memperoleh latihan khusus tentang segala sesuatu yang sesuai dengan fungsinya sebagai penyuluh.
- 11) Segenap keluarga, artinya penyuluh harus memperhatikan keluarga sebagai satu kesatuan dari unit sosial.
- 12) Kepuasan, artinya pemberdayaan harus mampu mewujudkan tercapainya kepuasan.

2.1.1.4 Strategi pemberdayaan

Dalam melaksanakan pemberdayaan perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan. Menurut Suharto (2005), penerapan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5P yaitu :

1. Pemukiman, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan, potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu

membebaskan masyarakat dari sekarat-sekarat kultural dan struktur yang menghambat.

2. Penguatan, memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
3. Perlindungan, melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan kepada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. Penyokongan, memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan .
5. Pemeliharaan, memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

2.1.1.5 Pendekatan Pemberdayaan

Axinn (1998) mengartikan “pendekatan” sebagai suatu “gaya” yang harus menentukan dan harus diikuti oleh semua pihak dalam sistem yang bersangkutan (*the style of action within a system*). Pendekatan-pendekatan ibarat bunyi kendang yang harus di ikuti penabuh gamelan dan penarinya. Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan yang dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan. Parsons, et al., (1994) berpendapat bahwa proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif, namun demikian, tidak semua intervensi fasilitator dapat dilakukan melalui kolektivitas. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat dilakukan secara individual, meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengkaitkan klien (penerima manfaat)

dengan sumber atau sistem lain diluar dirinya, oleh karenanya, dalam kontek pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Mikro

Pemberdayaan dilakukan terhadap klien (penerima manfaat) secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, dan *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien (penerima manfaat) dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai Pendekatan yang Berpusat pada Tugas (*task centered approach*).

2. Pendekatan Mezzo

Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien (penerima manfaat). Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap klien (penerima manfaat) agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

3. Pendekatan Makro

Pendekatan ini disebut sebagai Strategi Sistem Besar (*large system strategy*), karena penerima manfaat dan perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa startegi dalam pendekatan ini. Pendekatan ini memandang klien (penerima manfaat) sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

2.1.1.6 Pemberdayaan perempuan

Menurut Omy S.Pujono (1996 , hlm, 9) memaparkan bahwa pemberdayaan perempuan untuk memberikan kekuatan dan kemampuan terhadap potensi yang dimiliki oleh perempuan agar dapat diaktualisasikan secara optimal dalam prosesnya dan menempatkan perempuan sebagai manusia seutuhnya.

Pemberdayaan perempuan adalah upaya perempuan-perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial,

budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri (Budhy Novian,2010).

Menurut Morgen dan Bookman dalam buku Onny S.Pujono (1996 hlm,199) memaparkan mengenai pengertian pemberdayaan perempuan dan laki-laki adalah sebagai berikut: Pemenuhan kebutuhan praktis gender perempuan adalah pemenuhan kebutuhan dasar perempuan yang berbeda dengan laki-laki karena perbedaan gender mereka, yang perlu dicukupi agar mereka bisa bertahan hidup. Misalnya, masalah peningkatan makanan, perbaikan tempat tinggal, peningkatan penghasilan, pekerjaan, Pendidikan dasar, dan pelayanan kesehatan.

Konsep pemenuhan kebutuhan strategis gender muncul karena adanya analisis ketimpangan relasi gender laki-laki perempuan yang hidup dimasyarakat. Fokus kegiatan adalah pada upaya penyetaraan relasi dan partisipasi perempuan dengan laki-laki dalam hal pembuatan keputusan, akses yang sama untuk mendapat kesempatan bekerja, Pendidikan, latihan, kepemilikan tanah, kekayaan dan kredit, upah yang sama dengan laki-laki untuk jenis pekerjaan yang bernilai sama, kebebasan untuk memilih dalam pernikahan dan reproduksi, perlindungan terhadap pelecehan seksual, dan kekerasan yang dilakukan suami di rumah (Onny S.Pujono, 1996 hlm,199).

Menurut Anwar (2007 hlm,92) bahwa proses pemberdayaan perempuan melalui program Pendidikan luar sekolah pada dasarnya harus diawali dengan penyadaran masyarakat sasaran. Langkah penyadaran dimaksudkan agar masyarakat mampu mengidentifikasi kebutuhan dan merumuskan tujuan belajar atau tujuan hidupnya. Proses pemberdayaan tanpa diawali dengan penyadaran kelompok sasaran, maka kemungkinan akan menghadapi hambatan baik oleh masyarakat maupun oleh sumber belajar atau agen perubahan.

Menurut Onny S. Pujono (1996 hlm, 200) pemberdayaan perempuan meliputi pemberdayaan psikologis, sosial-budaya, ekonomi, dan politik yang berkaitan erat satu sama yang lain, karena dengan adanya jaringan kerjasama diantara yang saling memberdayakan dapat tercipta transformasi sosial dimana tidak ada penekanan dan pembudakan terhadap kaum perempuan. Strategi pemberdayaan dapat melalui

pendekatan individu, kelompok atau organisasi, khususnya organisasi perempuan. Sedangkan strategi pemberdayaan wanita sebagai mitra sejajar pria menggunakan pendekatan dua arah-wanita dan pria-yang saling menghormati (*respect*) sebagai manusia (*human being*), saling mendengar dan menghargai keinginan serta pendapat orang lain. Upaya saling memberdayakan ini meliputi usaha menyadarkan, mendukung, mendorong, dan membantu mengembangkan potensi yang terdapat pada diri individu, sehingga menjadi manusia mandiri tetapi tetap berkepribadian.

Menurut Aida Vitayala, (2010 hlm, 158) hakekat pemberdayaan perempuan adalah peningkatan hak, kewajiban, kedudukan, kemampuan, peran, kesempatan, kemandirian, ketahanan mental, dan spiritual wanita sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya peningkatan kualitas SDM. Sasaran pemberdayaan perempuan adalah meningkatnya kualitas wanita dan terciptanya iklim sosial budaya yang mendukung wanita untuk mengembangkan diri dan meningkatkan peranannya dalam pembangunan, termasuk berbagai dimensi kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Aida Vitalaya, 2010 hlm, 158).

Konsep pemberdayaan perempuan dan kesetaraan perempuan dan laki-laki, mengandung makna tidak ada pihak yang menguasai dan dikuasai, tidak ada yang mengeksploitasi dan dieksploitasi, tetapi mengandung arti kaum wanita dan pria saling memberdayakan sehingga mengakibatkan adanya dialog dalam komunikasi. Pada hakikatnya perempuan dan laki-laki saling membutuhkan untuk mencapai tujuan yang bersama yang tak dapat dilakukan sendiri (Onny S. Pujono, 1996 hlm, 2010).

2.1.1.7 Tujuan Pemberdayaan Perempuan

Tujuan pemberdayaan perempuan adalah untuk membangun kesadaran perempuan tentang kesetaraan gender agar mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, sehingga perempuan dapat mandiri dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Menurut Nugroho (2008), tujuan program pemberdayaan perempuan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk melibatkan diri dalam program pembangunan, sebagai partisipasi aktif (subjek) agar tidak sekedar menjadi objek pembangunan seperti yang terjadi selama ini.

- b. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam kepemimpinan, untuk meningkatkan posisi tawar menawar dan keterlibatan dalam setiap pembangunan baik sebagai perencana, pelaksana, maupun melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.
- c. Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam mengelola usaha skala rumah tangga, industri kecil maupun industri besar untuk menunjang peningkatan kebutuhan rumah tangga, maupun untuk membuka peluang kerja produktif dan mandiri.
- d. Meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan ditingkat lokal sebagai wadah pemberdayaan kaum perempuan agar dapat terlibat secara aktif dalam program pembangunan pada wilayah tempat tinggalnya.

Sedangkan menurut Sumodiningrat (1999), tujuan dari pemberdayaan perempuan adalah :

- a. Membangun eksistensi, dalam hal ini eksistensi perempuan. Perempuan harus menyadari bahwa ia memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Tidak seharusnya kaum perempuan selalu berada dalam posisi yang terpuruk. Perempuan memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri.
- b. Memotivasi perempuan agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidup melalui proses dialog. Perempuan juga berhak menentukan pilihan, tidak selamanya harus menuntut pada laki-laki.
- c. Menumbuhkan kesadaran pada diri perempuan tentang kesetaraan dan kedudukannya baik disektor publik maupun domestik.

2.1.1.8 Strategi pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan merupakan cara strategis untuk meningkatkan potensi perempuan dan meningkatkan peran perempuan baik di domain publik maupun domestik. Menurut Zakiah (2010), pemberdayaan perempuan dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Membongkar mitos kaum perempuan sebagai pelengkap dalam rumah tangga
- b. Memberikan beragam keterampilan bagi kaum perempuan

- c. Memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap kaum perempuan untuk bisa mengiktui atau menempuh pendidikan seluas mungkin

2.1.1.9 Langkah-langkah pemberdayaan perempuan

Menurut Sulistyani (2004), tahapan atau langkah-langkah pemberdayaan perempuan adalah sebagai berikut:

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Pada tahapan ini merupakan tahapan persiapan dalam proses pemberdayaan. Pada tahap ini pihak pemberdayaan harus bisa menciptakan pra-kondisi, sehingga dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Dalam proses penyadaran ini akan lebih membuka keinginan dan kesadaran masyarakat tentang kondisinya saat itu, dengan demikian maka akan merangsang kesadaran mereka tentang pentingnya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.
- b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran didalam pembangunan. Pada tahapan proses transformasi pengetahuan dan kecakapan keterampilan dapat berlangsung dengan baik, penuh semangat, dan berjalan efektif jika tahap pertama telah terkondisi. Masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan keterampilan yang relevan dengan tuntutan kebutuhan. Pada tahapan ini masyarakat dapat memberikan peran dan partisipasi pada tingkat yang rendah yaitu sekedar menjadi pengikut atau objek pembangunan saja, belum mampu menjadi subjek dalam pembangunan.
- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Tahap ini merupakan tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan keterampilan yang diperlukan supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut akan terlihat dari kemampuan masyarakat dalam membentuk inisiatif dan melakukan inovasi-inovasi baru didalam lingkungannya.

2.1.1.10 Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan perempuan

Menurut Aida Vitalaya S. Hubeis dalam Diana (2018, hlm. 35) keberhasilan pemberdayaan perempuan tergantung pada interaksi beberapa unsur yaitu sebagai berikut:

- a. Motivasi perempuan untuk memberdayakan diri hal ini memerlukan bantuan sarana dan prasarana (manusia, kelembagaan, tatanan keda) yang mampu memotivasi perempuan untuk memberdayakan diri, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk keluarga.
- b. Program-program tepat guna dan berdaya yang memiliki nilai tambah ekonomi bagi pemberdayaan perempuan, berarti kepedulian kalangan kepeguruan tinggi, swasta, dan LSM, selain pemerintah merupakan elemen penting yang perlu dimantapkan dalam bentuk tatanan mekanisme kelembagaan pemberdayaan sumber daya perempuan secara terstruktur.
- c. Dukungan berdedikasi dari seluruh aparat terlibat dalam hal ini, perlibatan perempuan untuk memberdayakan sumberdaya perempuan perlu dibuat secara spesifik menurut segmen sasaran khalayak, menurut status dan segmen ekonomi.
- d. Peran aktif masyarakat: dalam hal ini, kesamaan pemahaman akan makna pemberdayaan perempuan merupakan prasyarat tercapainya hasil optimal penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan peran wanita.

2.1.1.12. Pemberdayaan dan Partisipasi

Menurut Harry (2013, hlm.3) pemberdayaan dan partisipasi merupakan hal yang menjadi pusat perhatian dalam proses pembangunan belakangan ini diberbagai negara dan kemiskinan yang terus melanda dan menggerus kehidupan umat manusia.

Pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial, dan transformasi budaya. Pada proses ini, akan dapat menciptakan pembangunan yang lebih berpusat pada rakyat. Salah satu agen internasioanl, Bank Dunia misalnya, percaya bahwa adanya partisipasi masyarakat didunia ketiga merupakan sarana efektif yang menjangkau untuk

masyarakat termiskin melalui upaya pembangkitan semangat hidup untuk dapat menolong diri sendiri (Paul,1987) dalam Harry (2013, hlm.4).

Strategi pembangunan meletakkan partisipasi masyarakat sebagai fokus isu sentral pembangunan pada saat ini. Partisipasi masyarakat dinegara-negara dunia ketiga merupakan salah satu strategi efektif untuk mengatasi masalah urbanisasi dan industrialisasi (Caig dan Mayo, 1995) dalam Harry (2013, hlm 4)

2.1.2 Lahan Pekarangan Rumah

2.1.2.1 Pengertian Pekarangan Rumah

Pekarangan merupakan perpenduan pertanian yang melibatkan peran manusia dengan ekosistemnya. Secara ekologis, pekarangan dengan struktur tanaman yang tingginya berjenjang dan beraneka jenisnya, mulai dari jenis tanaman keras dengan ketinggian yang menjulang, sampai dengan tanaman perdu sejenis rerumputan, bukan saja akan mampu mengoptimalkan pengangguran energi matahari, melainkan juga melindungi tanah dan erosi akibat guyuran air hujan.

Pekarangan sebidang tanah di sekitar rumah yang mudah diusahakan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan gizi mikro melalui perbaikan menu keluarga. Pekarangan sering juga disebut lumbung hidup, warung hidup atau apotik hidup. Dalam kondisi tertentu, pekarangan dapat memanfaatkan kebun atau rawa disekitar rumah (Riah 2002, dalam jurnal Roza Yulida. 2012, hlm 137)

Menurut Mardikanto (1994) dalam jurnal Ashri(2012 hlm, 15) pekarangan diartikan sebagai tanah sekitar perumahan, kebanyakan berpagar keliling, dan biasanya ditanami tanaman padat dengan beraneka macam tanaman musiman maupun tanaman tahunan untuk keperluan sehari-hari dan untuk diperdagangkan. Pekarangan sering berdekatan dan bersama-sama membentuk kampung.

Dengan demikian, berbagai jenis tanaman dapat tumbuh berdampingan. Kesuburan tanah dan tata air pun tetap terjaga. Disamping itu, dalam pekarangan juga terjadi sistem daur ulang yang sangat baik. Dedaunan yang jatuh, sampah-sampah organik sisa rumah tangga, dan kotoran hewan ternak merupakan sumber daya yang baik bagi pertumbuhan tanaman pekarangan. Sebaliknya, dedaunan dan rerumputan segar dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak.

a. Peran pekarangan dan potensinya sebagai penghasil pangan

Pekarangan memiliki sejumlah peran dalam kehidupan sosial ekonomi rumah tangga petani. Menurut Sajogyo (1994) dalam jurnal Ashri (2012 hlm, 15-16) berpendapat bahwa pekarangan sebagai lumbung hidup, warung hidup atau apotik hidup. Disebut lumbung hidup karena sewaktu-waktu kebutuhan pangan pokok seperti beras, jagung, umbi-umbian, dan sebagainya tersedia dipekarangan. Bahan-bahan tersebut disimpan dalam pekarangan dalam keadaan hidup. Karena dalam pekarangan tersebut terdapat sayuran yang berguna untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga, dimana sebagian rumah tangga harus membelinya dengan uang tunai. Sementara itu disebut sebagai apotik hidup karena dalam pekarangan ditanami berbagai tanaman obat-obatan yang sangat bermanfaat dalam menyembuhkan penyakit secara tradisional.

Peran dan pemanfaatan pekarangan bervariasi dari satu daerah dengan daerah lain, tergantung pada tingkat kebutuhan, sosial, budaya, pendidikan masyarakat maupun faktor fisik dan ekologi setempat (Rahayu dan Prawiroatmodjo, 2005 dalam jurnal Ashri (2012, hlm,16). Menurut Terra (1967) dalam sajogyo (1994) fungsi pekarangan adalah untuk menghasilkan:1). Bahan makanan sebagai tambahan hasil sawah dan tegalnya, 2) sayuran dan buah-buahan, 3). Rempah, bumbu-bumbu dan wangi-wangian, 4) bahan kerajinan tangan, 5) kayu bakar, 6) uang tunai, serta 7) hasil ternak dan ikan.

b. Kebijakan/program pemanfaatan lahan pekarangan

Dewan Ketahanan Pangan (2006), sebagaimana dikutip Nainggolan (2008) telah menetapkan 10 kebijakan terkait ketahanan pangan sebagai panduan bagi pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan ketahanan pangan ditingkat wilayah dan nasional. Salah satu kebijakan yang ke 7 adalah “mencegah dan menangani keadaan rawan pangan dan gizi” dan salah satu kegiatannya adalah pemanfaatan pekarangan untuk meningkatkan gizi keluarga. Kegiatan yang dilakukan antara lain: penyuluhan, bimbingan dan fasilitasi kepada kelompok masyarakat pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga.

Gema pemanfaatan lahan pekarangan kembali menguat pada tahun 2012 yaitu saat Kementerian Pertanian RI menggagalkan Gerakan Percepatan

Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP). P2KP dimaksudkan untuk mengurangi konsumsi beras masyarakat Indonesia yang saat ini baru turun 0,6 persen per tahun. Gerakan ini merupakan tindak lanjut 2009 tentang kebijakan P2KP berbasis sumberdaya lokal (BKPD Jabar, 2011). Selanjutnya untuk mendukung P2KP melalui Direktorat Jendral Holtikultura dilaksanakan Gerakan Perempuan Untuk Optimalisasi Pekarangan (GPOP). Tujuan gerakan ini lebih difokuskan untuk memberdayakan perempuan perkotaan melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan. Komoditas utama yang akan dioptimalkan dalam GPOP adalah cabai kriting, sayuran, tanaman obat dan tanaman hias.

2.1.2.2 Tujuan

Pekarangan bertujuan meningkatkan produktivitas pekarangan dengan menggunakan teknologi tepat guna dan memanfaatkan pekarangan secara efektif. Pekarangan yang baik adalah pekarangan yang mempunyai pagar pembatas. Pagar dipekarangan berfungsi untuk membatasi pekarangan dengan pekarangan orang lain. Dengan adanya pagar yang baik, akan lebih menjamin keamanan tanaman dari berbagai gangguan.

Adapun tujuan pengembangan model KRPL berdasarkan Pedoman Umum Model KRPL kementerian pertanian (2011) adalah:

- a. Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga dan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan secara lestari,
- b. Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat dalam memanfaatkan lahan pekarangan diperkotaan maupun pedesaan untuk buah-buahan, sayuran, dan tanaman obat keluarga (toga), pemeliharaan ternak dan ikan, pengolahan limbah rumah menjadi kompos,
- c. Mengembangkan sumber benih atau bibit untuk pemanfaatan pekarangan dan melakukan pelestarian tanaman pangan lokal untuk masa depan, dan
- d. Mengembangkan kegiatan ekonomi produktif keluarga sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menciptakan lingkungan hijau yang bersih dan sehat secara mandiri.

Intensifikasi pekarangan bertujuan meningkatkan produktivitas pekarangan dengan menggunakan teknologi tepat guna dan memanfaatkan pekarangan secara

efektif. Dengan intensifikasi pekarangan, diharapkan kebutuhan pangan dan gizi bagi masyarakat akan terpenuhi. Pelaksanaan intensifikasi pekarangan bergantung pada letak pekarangan. Intensifikasi pekarangan dikota tentu akan berbeda dengan intensifikasi pekarangan didesa.

Optimalisasi pemanfaatan pekarangan dilakukan melalui upaya pemberdayaan wanita/kelompok masyarakat lainnya untuk budidaya pada lahan pekarangan maupun pengelola hasilnya. Pekarangan yang selama ini belum dimanfaatkan adalah potensi yang dapat dikelola sebagai sumber pangan dan gizi keluarga. Upaya pemanfaatan lahan dilakukan dengan membudidayakan sebagai jenis tanaman tanah, dan ikan sebagai tambahan untuk memenuhi ketersediaan pangan sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral. Manfaat lain yang diperoleh dari kegiatan ini adalah berkurangnya pengeluaran keluarga sekaligus dapat memberikan tambahan pendapatan keluarga jika hasil yang di peroleh telah melebihi kebutuhan pangan keluarga

2.1.2.3 Dasar Hukum Kegiatan KRPL

Program kawasan rumah pangan lestari (KRPL) ialah wujud upaya dari pemerintah dalam mempertahankan eksistensi pertanian, melindungi ketahanan pangan, kenaikan perekonomian, serta terpenuhinya kesejahteraan untuk warga. Gagasan program ini tertuang dalam Peraturan Presiden No 22 Tahun 2009 tentang Percepatan Penganekaragaman Mengonsumsi Berbasis Sumber Energi Lokal, Peraturan Menteri Pertanian No 43 Tahun 2009 Tentang gerakan P2KP Berbasis Sumber Energi Lokal serta Peraturan mnetri Pertanian No 15 Tahun 2013 Tentang Kenaikan Diversifikasi serta Ketahanan Pangan Warga, yang dimana pada pengimplementasiannya mengutamakan aspek optimalisasai lahan pekarangan buat meningkatkan kebutuhan pangan, sayur-mayur, buah-buahan, tumbuhan obat, ataupun peternakan serta perikanan skala kecil guna menaikkan gizi, tingkatkan serta ataupun mendukung ekonomi dan kesejahteraan warga (Hanafi 2019 hlm,51).

2.1.2.4 Pelaksanaan Kegiatan KRPL

1. Penetapan Lokasi dan Penerima Manfaat

Kegiatan KRPL dilakukan oleh kelompok sebagai kumpulan individu yang mempunyai tujuan yang sama, baik kelompok dibentuk baru atau menggunakan

kelompok yang telah terbentuk diwilayah tersebut (kelompok lama yang sudah ada dan eksis).

a. Syarat dan kriteria yang harus terpenuhi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CP/CL) kegiatan KRPL:

- 1) Kelompok wanita/dasawisma atau kelompok masyarakat lainnya beranggotakan minimal 30 (tiga puluh) rumah tangga/ orang dalam satu kawasan atau sesuai dengan potensi wilayahnya.
- 2) Memiliki kelembagaan yang sah dan struktur organisasi/ kepengurusan yang di sahkan kepala desa/ lurah/ pejabat yang berwenang.
- 3) Kelompok yang belum pernah mendapatkan kegiatan KRPL dari dan APBN
- 4) Mampu menyediakan lahan untuk kebun bibit dan demplot (bukan nyewa lahan) minimal selama tiga tahun yang dituangkan dalam surat perjanjian.
- 5) Untuk kabupaten prioritas penanganan rawan pangan, diutamakan desa yang masuk dalam prioritas rentan rawan pangan berdasarkan FSVA atau berdasarkan indikator angka kemiskinan.

b. Mekanisme penetapan desa dan kelompok penerima manfaat

- 1) Tim teknis kabupaten/kota melakukan verifikasi CP/CL berkoordinasi dengan camat untuk memilih lokasi desa dan dengan kepala desa untuk memilih kelompok yang memenuhi kriteria sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan, meliputi identitas penerima manfaat (nama dan alamat kelompok, jumlah anggota kelompok, nama dan alamat ketua dan anggota kelompok, nomor rekening kelompok).
- 2) Seleksi calon penerima dan calon lokasi melalui tahapan seleksi daftar panjang (long-list), daftar sedang (medium-list), dan daftar pendek (short-list). Adapun tahapan seleksi tahapan CP/CL adalah seluruh usulan atau proposal yang masuk dalam daftar panjang (long-list) diseleksi secara administratif.

c. CP/CL dilaporkan atau dikonsultasikan kepada provinsi untuk divalidasi

d. Selanjutnya hasil CP/CL tersebut ditetapkan melalui keputusan pejabat pembuatan komitmen (PKK) dan disahkan oleh kuasa pengguna anggaran (KPA)

- e. Keputusan tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Badan Ketahanan pangan pusat penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta kepada Dinas atau Badan Unit Kerja yang menangani ketahanan pangan provinsi.
- f. Kelompok yang telah diidentifikasi harus membuat surat pernyataan sebelum ditetapkan.

2. Pendampingan

- a. Syarat mekanisme penetapan pendampingan
 - 1) Syarat dan kriteria pendampingan KRPL kabupaten/kota
 - 2) Syarat dan kriteria pendamping kelompok KRPL
 - 3) Hasil penetapan pendampingan KRPL tingkat kabupaten/kota dan pendamping kelompok dilaporkan kepada Badan Ketahanan Pangan Pusat Penganekaragaman Konsumsi keamanan pangan.
 - 4) Pendamping bertanggung jawab selama satu tahun anggaran. Jika pendamping tidak dapat melaksanakan tugas, maka pendamping dapat diganti melalui usulan perubahan Keputusan PPK dan Dina/Unit Kerja yang Menangani Ketahanan Pangan Provinsi.
- b. Tugas pendamping
 - 1) Tugas pendamping KRPL Kabupaten/ Kota
 - a) Bersama aparat kabupaten/kota melakukan identifikasi CPCL
 - b) Membimbing dan mendampingi pelaksanaan kegiatan KRPL diseluruh desa penerima manfaat
 - c) Memberikan sosialisasi dan pelatihan kegiatan KRPL dan konsumsi B2SA kepada pendamping kelompok
 - d) Merekap laporan data awal dan data terakhir, konsumsi sayuran dikelompok
 - e) Bersama aparat kabupaten/kota memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lapangan
 - f) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan KRPL dan menyerahkannya kepada Dinas/Unit kerja yang menangani ketahanan pangan provinsi.
- c. Tugas pendamping kelompok KRPL
 - a) Membimbing kelompok dalam pelaksanaan kegiatan KRPL melalui pendampingan dan pelatihan.

- b) Melakukan identifikasi potensi desa melalui kegiatan budidaya (tanaman pangan, sayuran dan buah, peternakan, dan perikanan) dan kegiatan non budidaya (teknologi pemanfaatan hasil pekarangan, pengolahan pangan lokal, dan usaha lainnya yang terkait diversifikasi pangan).
- c) Membantu kelompok dalam penyusunan rencana kerja dan kebutuhan anggaran (RKKA) kelompok
- d) Membantu kelompok untuk membuat dan mengelola kebun
- e) Membantu pengambilan data awal dan data akhir konsumsi sayuran pada rumah tangga atau anggota kelompok yang di dampingi.
- f) Memberikan informasi dan motivasi kelompok untuk menerapkan pola konsumsi pangan B2SA
- g) Melaksanakan praktek penyusunan dan pengolahan menu B2SA bersama kelompok
- h) Melakukan kunjungan dan pertemuan rutin kelompok sesuai dengan yang telah dijadwalkan
- i) Membantu kelompok dalam pengelolaan dana bantuan pemerintah
- j) Membuat laporan perkembangan kegiatan kelompok dan mengumpulkannya pendmappingan kabupaten/kota.

d. Penyusunan Rencana Kegiatan

1) Identifikasi Kebutuhan Kelompok

Meliputi kebutuhan sarana dan prasarana, teknologi dan ketersediaan air serta komoditas tanaman. Informasi yang diperlukan termasuk luas kebun bibit, demplot, dan kebun sekolah serta sarana pendukung yang diperlukan untuk operasional kebun bibit, demplot, dan kebutuhan pekarangan anggota. Dilakukan melalui diskusi dalam suatu pertemuan kelompok atau pendalaman kepada anggota kelompok dalam rangka mengidentifikasi kebutuhan anggota.

2) Penyusunan Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran (RKKA)

Penyusunan rencana kegiatan yang di susun meliputi jenis kegiatan, lokasi waktu pelaksanaan, dan pelaksana termasuk didalamnya. rencana kegiatan tersebut merupakan panduan dalam melaksanakan kegiatan KRPL bagi kelompok.

e. Pendampingan dan Pelatihan

Kegiatan KRPL dilaksanakan dengan pendampingan dan pelatihan yang dilakukan oleh pendamping kelompok KRPL. Metode ini menggunakan pendekatan praktek langsung (*self learning*) dalam pengembangan dan pekarangan mulai dari aspek budidaya hingga pengolahan hasil pekarangan (*from fram to table*) dengan tetap memperhatikan kebutuhan gizi keluarga sehari-hari dan kelestarian lingkungan. Tujuan khusus pendampingan dan pelatihan adalah:

- a. Membudayakan pemanfaatan pekarangan dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan dikalangan masyarakat.
- b. Mempercepat penerapan pengetahuan tentang penganekaragaman konsumsi pangan, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran dalam mengelola pekarangan dan menerapkan pola konsumsi B2SA.
- c. Meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan melalui pemanfaatan pekarangan

3. Peran Pekarangan dan potensinya sebagai penghasil pangan

Pekarangan memiliki sejumlah peran dalam kehidupan sosial ekonomi (1994), pekarangan sering disebut lumbung hidup, warung hidup atau apotik hidup. Disebut lumbung hidup karena sewaktu-waktu kebutuhan pangan pokok seperti beras, jagung, umbi-umbian dan sebagainya tersedia dipekarangan. Bahan-bahan tersebut ditanam didalam pekarangan. Disebut sebagai warung hidup, karena pekarangan terdapat tanaman sayuran yang berguna untuk memenuhi kebutuhan makanan didalam keluarga. Selain itu disebut sebagai apotik hidup, karena didalam pekarangan tidak hanya menanam umbi-umbian, sayur-sayuran tetapi didalam pekarangan bisa menanam tanaman obat-obatan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

Peranan dan pemanfaatan bervariasi dari suatu daerah dengan daerah lain, tergantung pada tingkat kebutuhan, sosial, budaya. Pendidikan masyarakat maupun faktor fisik dan ekologi setempat (Rahayu dan Prawiroatmodjo, 2005) menurut Terra (1967) dalam Sajogjo (1994), fungsi pekarangan adalah untuk menghasilkan bahan makanan sebagai bahan tambahan hasil sawah dan tegalnya, sayuran dan

buah buahan, rempah-rempah, bumbu-bumbu, dan wangi-wangian, bahan kerajinan tangan, kayu bakar, uang tunai dan hasil ternak dan ikan.

4. Pembuatan dan pengolahan kebun bibit

Kebun bibit merupakan satu sumber bibit dalam pengembangan KRPL, sebagai upaya menuju terciptanya rumah pangan lestari (RPL), RPL yang dimaksud adalah rumah tangga atau tempat tinggal/pondok pesantren/ asrama / rusun yang memanfaatkan pekarangan secara optimal melalui model KRPL untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi sehari-hari serta menambah pendapatan keluarga.

5. Dampak Program pemanfaatan Pekarangan

Salah satu manfaat terpenting dari fungsi pekarangan, menurut Novitasari (2011) dalam jurnal Ashari, dkk hlm 20) adalah untuk menyediakan kebutuhan pangan dan gizi keluarga dengan cara ditanami berbagai jenis tanaman dalam upaya meningkatkan keragaman pangan keluarga. Bahkan dengan banyaknya manfaat yang diperoleh dari pekarangan Sajogjo (1994) menyatakan bahwa pekarangan disebut juga sebagai lumbung hidup, warung hidup, dan apotik hidup.

Dampak progma pemanfaatan lahan pekarangan yang cukup lengkap dikemukakan oleh Saptana et al. (2011) dalam jurnal Ashari, dkk hlm (20) dari hasil kajian dipacitan. Beberapa dampak positif dari kegiatan KPRL diantaranya:

- a) Meningkatkan konsumsi energi dan konsumsi protein bagi rumah tangga petani peserta secara nyata. Selain itu, M-KRPL telah meningkatkan konsumsi pangan dan peningkatan skor PPH sebesar 11,90-20,46 persen. Disarankan mengembangkan komoditas pertanian yang berpotensi tinggi meningkatkan skor PPH yaitu komoditas hortikultura, umbi-umbian serta ternak dan ikan.
- b) Mengurangi pengeluaran untuk konsumsi pangan. Pengurangan pengeluaran kelompok pangan terbesar secara berturut-turut adalah kelompok sayur, ubi, hasil ternak, dan ikan. Disarankan pengembangan komoditas pertanian harus memperhatikan aspek kebutuhan pangan keluarga dan potensi mengurangi pengeluaran konsumsi, sehingga kesejahteraan keluarga dapat ditinggikan.
- c) Meningkatkan pendapatan rumah tangga peserta program. Secara rata-rata sumbangan lahan pekarangan terhadap total pendapatan rumah tangga setelah program M-KRPL diperkirakan mencapai sebesar 6,81 persen. Untuk

meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan keluarga dapat diintroduksikan komoditas yang bernilai ekonomi tinggi dan memiliki prospek pasar.

- d) Merangsang tumbuhnya ekonomi produktif di pedesaan, seperti: 1) usaha pembibitan, 2) teknologi penetasan telur ayam, 3) kios saprodi, 4) usaha pengolahan hasil pertanian, 5) usaha dan hasil gang pertanian. Untuk meningkatkan dampak secara lebih akseleratif dapat dikembangkan infrastruktur pendukung dan investasi.

2.1.3 Kelompok Wanita Tani (KWT)

2.1.3.1 Pengertian Kelompok

Kelompok adalah sesuatu yang alami, karena manusia sebagai makhluk sosial akan berinteraksi satu dengan yang lain sehingga membentuk kelompok – kelompok tertentu. Kelompok adalah dua orang atau lebih individu yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya (shaw dalam sudjarwo, 2011 hlm,3). Menurut Mills (dalam Samsi, 2011 hlm,13) kelompok adalah suatu kesatuan yang terdiri atas dua orang atau lebih yang melakukan kontak hubungan untuk suatu tujuan tertentu. Sedangkan menurut Hommans (dalam Sudjarwo, 2011. Hlm,3) kelompok adalah sejumlah individu yang melakukan komunikasi selama jangka waktu tertentu secara langsung tanpa melalui perantara.

Ketiga pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kelompok adalah sekumpulan orang/individu yang terorganisir, dengan kesamaan kegiatan dan tujuan yang sama. Saling berkomunikasi secara verbal maupun non-verbal dengan mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi individu dan terciptanya sebuah ikatan psikologis yang erat diantara anggota kelompok dalam jangka waktu tertentu.

2.1.3.2 Ciri-ciri Kelompok

Kelompok merupakan kumpulan individu yang melakukan kegiatan, interaksi, dan memiliki perasaan untuk membentuk suatu keseluruhan yang terorganisasi dan hubungan timbal balik. Suatu kelompok itu bisa disebut kelompok apabila memiliki ciri-ciri. Menurut Van Zanden (dalam Sudjarwo, 2011 hlm,5) ciri-ciri kelompok meliputi : 1) kelompok itu memiliki ciri tertentu yang dibatasi oleh lokasi geografis, paham politik, agama, dan lain-lain, 2) kelompok itu memiliki tujuan yang jelas, 3)

umumnya anggota menyadari bahwa keanggotaanya dalam kelompok itu berbeda dengan kelompok lain.

Sedangkan menurut Gerungan (2004 hlm,94) ciri-ciri kelompok antara lain: a) terdapat dorongan (motif) yang sama, b) terdapat akibat-akibat interaksi yang berlainan, c) pembentukan dan penegasan struktur (atau organisasi) yang jelas, d) terjadinya penegasan dan peneguhan norma-norma pedoman tingkah laku anggota kelompok.

Berbagai macam ciri kelompok menurut para ahli memiliki benang merah yang sama yaitu adanya kesamaan dan tujuan dan keanggotaan yang terikat antara satu dengan yang lainnya. makna pelakat tersebut sebagai interaksi atau sebagai kesamaan yang membuat kelompok itu berada dalam arti gerak prosesnya (Wildan, 2016 hlm.6). Pendapat lain dikemukakan oleh Shaw (1981) dalam (Wildan Zulkanair 2014, hlm,8) menjelaskan tentang ciri-ciri kelompok sebagai berikut:

1. Adanya persepsi setiap anggota yang didasarkan asumsi bahwa tiap orang sadar akan hubungan dengan orang lain,
2. Adanya tujuan yang hendak dicapai,
3. Adanya motivasi, dimana tiap anggota kelompok menginginkan kepuasan terhadap kebutuhannya dari kelompok yang dimasukinya
4. Adanya interdependensi, yaitu saling tergantung antara anggota,
5. Adanya interaksi yang merupakan suatu bentuk aktual dan interdependensi, dimana tiap anggota saling berkomunikasi. Interaksi tersebut dapat berupa interaksi verbal, interaksi fisik, dan interaksi emosional.
6. Adanya organisasi yakni kesatuan fungsi dalam mekanisme reguler.

Berdasarkan pendapat mengenai ciri-ciri kelompok, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri kelompok meliputi: a) adanya motif yang sama antara anggota kelompok, b) memiliki tujuan yang jelas, c) penegasan struktur kelompok, d) penegasan norma-norma kelompok, e). adanya interaksi sosial.

2.1.3.4 Fungsi Kelompok

Menurut Kartini Kartono (dalam Sudjarwo, 2011 halm, 6) melihat fungsi kelompok tidak hanya dari interkasinya akan tetapi lebih dalam lagi yaitu dengan penjelasan sebagai berikut : a) kelompok merupakan wadah dan ruang psikologis,

b) munculnya kader yang menunjukkan loyalitas dan kesetiakawanan sosial, c) memberikan rasa aman pada semua anggotanya, d) adanya penghargaan melalui status dan peran masing-masing anggotanya, e) adanya satu tujuan ideal tertentu dari kelompok, f) kelompok dapat berperan sebagai wahana untuk mencapai tujuan, g) anggota kelompok sebagai individu merasa sebagai organ dari kelompok.

Secara umum fungsi kelompok berfungsi untuk memenuhi kebutuhan anggota agar setiap anggota relatif merasa puas, walau sebenarnya fungsi kelompok tidak hanya sebatas itu saja. Crech dan Crueth field (dalam Wildan, 2016 hlm.8) menguraikan fungsi kelompok dengan lebih rinci yaitu:

- a. fungsi kelompok sebenarnya unik, artinya ciri sekaligus fungsi dapat tergambar pada suatu kelompok tertentu dengan sekaligus. Contoh kelompok pengajian, dimana tampak antara fungsi dan ciri melekat sekaligus.
- b. Fungsi kelompok merupakan *accessory*, artinya kelompok merupakan bingkai dari sejumlah kegiatan yang ada dalam satu kesatuan.
- c. Fungsi kelompok *dominance* dan *belonginess*. Maksudnya sekalipun dalam kelompok terdapat kegiatan sub kelompok, namun kelompok tetap dapat memelihara rasa kebersamaan dari seluruh anggota kelompoknya.

2.1.3.5 Tujuan Kelompok

Tujuan kelompok ialah apa yang akan dicapai oleh kelompok dan harus mewujudkan relevansi dengan tujuan anggota serta diketahui oleh semua anggota (sudjarwo, 2011 halm,16). Menurut Shaw dalam Mardikanto (1996 halm,70) mengartikan tujuan kelompok sebagai hasil akhir atau keadaan yang diinginkan oleh semua anggota kelompok. Tujuan kelompok biasanya dirumuskan sebagai perpaduan dari tujuan-tujuan semua anggota kelompok. Tujuan kelompok merupakan hasil akhir yang ingin dicapai individu ataupun kelompok yang sedang bekerja, atau secara ideal, tujuan merupakan hasil yang diharapkan menurut nilai orang-orang. Tujuan kelompok disusun berdasarkan mayoritas individu yang bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan terdiri dari tujuan jangka pendek yang merupakan batu loncatan untuk tujuan jangka panjang.

Disimpulkan bahwa tujuan kelompok merupakan pedoman dalam pencapaian program dan aktivitas serta memungkinkan untuk terukurnya efektivitas dan

efisiensi kelompok. Komitmen anggota akan tergantung kepada keterkaitannya terhadap kelompok dan tujuan kelompok. Tingkat resiko dalam pencapaian tujuan kelompok harus ditetapkan dan dipatu secara hati-hati.

2.1.3 Pengertian Kelompok Wanita Tani

Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang terikat secara nonformal dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota Kelompok wanita tani atau disingkat “KWT” merupakan kelompok swadaya yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jumlah anggota kelompok idealnya berkisar 20-30 orang atau disesuaikan dengan kondisi dan wilayah kerja kelompok tidak melampaui batas administrasi desa. Anggota kelompok tani dapat berupa petani dewasa dan pemuda, wanita dan pria. Anggota keluarga petani (istri dan anak) yang berperan membantu kegiatan usaha tani keluarga, tidak dimasukan menjadi anggota kelompok tetapi diarahkan membentuk kelompok wanita tani atau pemuda tani.

Berdasarkan penelitian Alihamsyah et al (2000); Ananto et al (2000); Pranaji et al (2000) terdapat 17 kelembagaan yang ada ditingkat desa yang berkaitan dengan sistem usaha tani (SUT) padi, salah satunya adalah kelompok wanita tani. Kelompok Wanita Tani adalah kumpulan istri petani yang membantu kegiatan usaha pertanian, perikanan dan kehutanan dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarganya. Menurut UPTBP3K penumbuhan kelompok tani didasarkan pada prinsip-prinsip (<http://uptbp3k.com>): kebebasan, keterbukaan, partisipatif, keswadayaan, kesetaraan dan kemitraan. Dengan demikian kelompok wanita tani merupakan kelompok yang tumbuh atas inisiatif dan kemauan serta kesadaran masyarakat sendiri guna ikut berpartisipasi aktif, meningkatkan, mengembangkan, dan memberdayakan SDA dan SDM yang dimiliki.

Kegiatan kelompok tani merupakan perkumpulan yang beranggotakan para petani desa tersebut. Meskipun tidak semua petani didesa tersebut mengikuti kegiatan ini. Ketua kelompok tani dipilih dari salah seorang petani yang dianggap memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Ketua kelompok tani yang terpilih diharapkan dapat menjalankan tugas dan kewajibannya antara lain

mengkoordinasikan kegiatan gotong royong untuk pengolahan lahan anggota kelompok tani secara bergantian, mengkoordinasikan penjualan hasil produksi, dan melakukan hubungan dengan pihak penyuluh maupun dinas pertanian.

Kelompok tani sebagai wadah organisasi yang bekerja sama antar anggota mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat tani dilaksanakan oleh kelompok secara bersamaan (www.hidup-pertanian.blogspot.com) adanya kelompok tani para petani dapat bersama sama dapat memecahkan permasalahan yang antara lain berupa pemenuhan sarana produksi pertanian, teknis produksi dan pemasaran hasil.

Kelompok tani sebagai kumpulan para petani yang tumbuh berdasarkan keakraban dan keserasian, serta kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya (Departemen Pertanian RI 1997 dalam Samsi 2011 halm,15). Fungsi utama kelompok tani pada dasarnya adalah sebagai wahana sebagai proses belajar-mengajar, wahana bekerjasama, dan wahana berproduksi. Apabila ketiga fungsi tersebut telah berjalan dengan baik, maka diarahkan menjadi kelompok usaha.

Berdasarkan kedua pengertian diatas disimpulkan bahwa Kelompok Wanita Tani (KWT) adalah kumpulan para wanita yang mempunyai aktivitas dibidang pertanian yang tumbuh berdasarkan keakraban, keserasian, serta kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya.

2.1.3.1 Peran Kelompok Wanita Tani

Keterlibatan wanita yang semakin tinggi dalam pertanian adalah karena dorongan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga atau disisi lain mungkin untuk membuat posisi wanita semakin kuat dalam keluarga (Hutajulu, 2004).

Wanita berperan sebagai ibu rumah tangga berkewajiban membantu ayah dalam menyelamatkan rumah tangga, mengatur rumah, menyediakan makanan, dan segala keperluan sehari-hari didalam rumah tangga.

Peran wanita dalam pengambilan manajemen usaha tani tak dapat diabaikan. Umumnya wanita tani berperan sebagai pekerja yang membantu kegiatan suami (bapak tani). Keragaman hidup wanita tani dari waktu ke waktu terus berubah, tercermin dari perubahan peran manajerial usaha tani, teknologi, maupun meningkatnya jumlah pekerjaan sampingan yang dilakukan wanita tani, baik didalam sektor pertanian maupun diluar sektor pertanian (Findeis, 2001) dalam (Prihtani dan Kristianingsih, 2010).

Peran yang seharusnya dilakukan oleh perempuan dalam pembangunan melalui apa yang kita kenal dengan panca tugas perempuan, yaitu; 1) sebagai istri supaya dapat mendampingi suami, sebagai kekasih dan sahabat bersama-sama membina keluarga yang bahagia. 2) sebagai ibu pendidik dan pembina generasi muda supaya anak-anak dibekali kekuatan rohani dan jasmani dalam menghadapi segala tantangan zaman dan menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa. 3) sebagai ibu pengatur rumah tangga supaya rumah tangga merupakan tempat aman dan teratur bagi seluruh anggota.

Menurut Nurmayasari dan Ilyas (2014), wanita tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga pada dunia pertanian, tetapi banyak wanita yang ikut berperan aktif atau memberi kontribusi pendapatan dalam keluarga pada usaha yang diusahakan oleh keluarga mereka. Kenyataannya sekitar 50 persen wanita tani disamping bekerja di rumah tangga, mereka juga bekerja diladang atau disawah bahkan mereka membuka lapangan pekerjaan sendiri dengan mengikuti KWT.

Hal ini dilaksanakan karena mereka berharap dengan adanya peran atau keterlibatan wanita tani, jumlah produktivitas usaha akan meningkat dan perekonomian dalam keluarga dapat terpenuhi.

2.1.3.2 Fungsi Kelompok Wanita Tani

Sisitem penyuluhan pertanian di Indonesia, Departemen Pertanian menetapkan bahwa kelompok tani memiliki tiga fungsi utama (Martaatmadja 1993, Martins, 1997, dan Departemen Pertanian, 1997 dalam Hariadi, 2011 hlm,54) yakni: a) sebagai unit belajar, adalah kelompok tani merupakan wadah belajar bagi anggotanya guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap (PKS) serta tumbuh dan berkembangnya kemandirian dalam berusaha tani sehingga

produktivitasnya meningkat, pendapatnya bertambah serta kehidupan yang lebih sejahtera. b) Unit kerjasama, kelompok tani merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama diantara sesama petani dalam kelompok tani dan antar kelompok tani serta dengan pihak lain, melalui kerja sama ini diharapkan usaha taninya akan lebih efisien serta lebih mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, c) unit produksi, usaha tani yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota kelompok tani, secara keseluruhan harus dipandang sebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi, baik dipandang dari segi kuantitas, kualitas maupun kontinuitas. Menurut Departemen Pertanian 1997 (dalam Samsi, 2011 hlm,5) apabila ketiga fungsi tersebut sudah berjalan maka diarahkan untuk menjadi unit kelompok usaha.

Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang terikat secara nonformal dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota Kelompok wanita tani atau disingkat “KWT” merupakan kelompok swadaya yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jumlah anggota kelompok idealnya berkisar 20-30 orang atau disesuaikan dengan kondisi dan wilayah kerja kelompok tidak melampaui batas administrasi desa. Anggota kelompok tani dapat berupa petani dewasa dan pemuda, wanita dan pria. Anggota keluarga petani (istri dan anak) yang berperan membantu kegiatan usaha tani keluarga, tidak dimasukkan menjadi anggota kelompok tetapi diarahkan membentuk kelompok wanita tani atau pemuda tani.

2.1.3.3 Penyuluh sebagai proses pendidikan

Menurut Berlo (1960) dalam Waryana (2016, hlm. 94) mengemukakan bahwa, kegiatan penyuluhan sebagai proses pendidikan, pada hakekatnya berupaya untuk menggerakkan masyarakat agar aktif didalam proses belajar. Proses belajar itu sendiri merupakan proses pemberian respon (tanggapan) atas segala rangsangan-rangsangan (*stimulus*) yang diterimanya selama proses belajar itu berlangsung. Sehubungan dengan itu, setiap penyuluh perlu memahami adanya teori rangsangan dan tanggapan (*stimulus respons theory*) yang mengemukakan bahwa, seseorang hanya memberikan tanggapan atas rangsangan yang diterimanya, dengan

memberikan tanggapan akan memperoleh sesuatu manfaat (*reward*). Yang artinya dengan manfaat disini ialah manfaat yang dapat dirasakan oleh sasaran, dan bukan hanya manfaat yang dapat diharapkan oleh pemberi rangsangan.

2.1.4 Pendapatan keluarga

2.1.4.1 Pengertian pendapatan keluarga

Pendapatan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atas faktor-faktor produksi yang mereka sumbangkan dalam turut serta membentuk produk nasional. Menurut Reskopravitno, pendapatan atau income adalah uang yang diterima oleh seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa bunga, dan laba termasuk juga beragam tunjangan, seperti kesehatan dan pensiun. Ada 3 kategori pendapatan yaitu:

1. Pendapatan berupa uang yaitu segala penghasilan berupa uang yang sifatnya regular dan yang diterima biasanya sebagai balas jasa atau kontra prestasi.
2. Pendapatan berupa barang adalah segala pendapatan yang segala sifatnya regular dan biasa, akan tetapi selalu berbentuk balas jasa dan diterima dalam bentuk barang dan jasa.
3. Pendapatan yang bukan merupakan pendapatan adalah segala penerimaan yang bersifat transfer redistributive dan biasanya membuat perubahan dalam keuangan rumah tangga (Sunharjo, 2009)

Menurut Zaidin 2010 dalam Deti (2015, hlm. 7) pendapatan keluarga adalah jumlah penghasilan real dari penghasilan seluruh anggota rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari. Pendapatan keluarga merupakan jasa atau imbalan yang didapat dari sumbangan yang diberikan dalam kegiatan produksi. Menurut Gilarso (1992) dalam Deti (2015, hlm.7) Secara konkrit pendapatan keluarga berasal dari 3 komponen yaitu:

1. Usaha sendiri: berdagang, bertani, membuka usaha atau wiraswastawan.
2. bekerja dengan orang lain : sebagai pegawai negeri atau karyawan .
3. Hasil dari pemilihan: tanah yang disewakan, dan lain-lain

4. Berupa pendapatan melalui santunan baik berupa beras, fasilitas perumahan dan lain-lain. Pada umumnya pendapatan itu sendiri terdiri dari pendapatan nominal berupa uang dan pendapatan riil berupa barang.

Menurut Darmawan (2002) dalam Deti (2015, hlm. 5), pendapatan keluarga ialah pendapatan yang diperoleh melalui faktor-faktor produksi yang diperoleh imbalan jasa-jasa atau penggandaan faktor produksi dalam bentuk gaji, modal kerja dan sebagainya. Besarnya pendapatan akan menggambarkan ekonomi keluarga dalam masyarakat yang dapat dikategorikan kedalam tiga kelompok, yaitu pendapatan rendah, sedang, dan tinggi. Besarnya jumlah anggota keluarga akan lebih banyak membutuhkan tenaga kerja untuk mencari pekerjaan agar dapat memperoleh pendapatan. Umumnya pada setiap kepala keluarga menentukan utama pendapatan keluarga, namun dalam anggota keluarga lainnya juga dapat ikut berperan.

Pendapatan keluarga adalah jumlah penghasilan riil dari seluruh anggota rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bersama maupun perseorangan dalam rumah tangga. Pendapatan keluarga merupakan balas karya atau jasa atau imbalan yang diperoleh karena sumbangan yang diberikan dalam kegiatan produksi.

Menurut Tamadi (dalam Asri, 2013:14) ukuran taraf pemenuhan kebutuhan dibagi menjadi tiga kelompok yaitu kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis, dan kebutuhan pengembangan. Pengertian dari ketiga kelompok kebutuhan tersebut sebagai berikut :

- a. Kebutuhan dasar yang terbagi dari: a) pendidikan, kebutuhan ini mencakup pemenuhan kebutuhan makan dan gizi sehari-hari, b) Sandang, kebutuhan ini mencakup kebutuhan pemenuhan pakaian yang layak pakai dan bersih, c) Papan, merupakan tempat tinggal sehari-hari bagi keluarga yang harus terpenuhi, d) Kesehatan, kebutuhan untuk hidup sehat sehari-hari.
- b. Kebutuhan sosial psikologis yang terdiri dari: a) pendidikan, pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi anak yang mencakup pendidikan formal, informal, dan nonformal, b) rekreasi, kebutuhan akan hiburan dalam kehidupan keluarga, c) transportasi, kebutuhan akan kendaraan untuk transportasi sehari-hari, d)

interaksi sosial internal dan eksternal, kebutuhan untuk berinteraksi dalam keluarga dan juga masyarakat.

- c. Kebutuhan dan pengembangan yang terdiri dari: a) tabungan, simpanan uang atau barang yang digunakan untuk kesehatan, pendidikan anak, jaminan hari tua, dan juga untuk kebutuhan mendadak, b) akses terhadap informasi, kebutuhan untuk mendapatkan informasi dari luar keluarga, misal informasi masyarakat dan negara.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa indikator ukuran taraf pemenuhan kebutuhan hidup terdiri dari: kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis, dan kebutuhan pengembangan. Indikator keluarga sejahtera yaitu terpenuhinya kebutuhan pokok bagi keluarga. Indikator keluarga sejahtera pada dasarnya disusun untuk menilai taraf pemenuhan kebutuhan keluarga yang dimulai dari kebutuhan yang sangat mendasar sampai dengan pemenuhan kebutuhan yang diperlukan untuk pengembangan diri dan keluarga.

2.1.4.2 Peningkatan Pendapatan Keluarga

Secara umum, peningkatan merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan derajat, kualitas maupun kuantitas dalam kemajuan seseorang. Peningkatan juga dapat diartikan sebagai penambah kemampuan serta keterampilan seseorang agar menjadi lebih baik. Namun, selain itu peningkatan juga berarti pencapaian seseorang melalui proses, sifat, hubungan, ukuran dan sebagainya.

Program pemberdayaan masyarakat seperti yang ada di Kelurahan Setiawangi yakni pemanfaatan pekarangan rumah jika dikelola lebih baik dapat lebih bermanfaat dalam mencukupi kebutuhan pangan dalam keluarga dan menghasilkan pendapatan baru bagi keluarga. Dengan meningkatnya pendapatan dalam keluarga akan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk kepentingan keluarga.

Berdasarkan uraian di atas, maka peningkatan pendapatan keluarga adalah suatu keadaan yang dapat ditandai oleh bertambahnya suatu penghasilan yang diterima seseorang dalam hitungan jam, hari, minggu, ataupun bulan atas dasar yang sudah dikerjakan melalui suatu kegiatan usaha kelompok wanita tani.

2.1.4.3 Definisi Keluarga

Keluarga adalah dua atau lebih individu yang bergabung karena hubungan darah, perkawinan, dan adopsi dalam satu rumah tangga, yang berinteraksi satu dengan lainnya dalam peranan dan menciptakan serta mempertahankan suatu budaya. (zaidin, 2010). Keluarga adalah dua atau lebih dari dua individu yang tergantung karena hubungan darah, perkawinan, atau pengangkatan dan mereka hidup didalam peranannya masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan. (Syafrudin, 2009).

Menurut Pujosuwarno (1994 halm,11), keluarga adalah suatu ikatan persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis hidup bersama atau seorang laki-laki atau seorang perempuan yang sudah sendirian dengan atau tanpa anak-anak, baik anaknya sendiri atau adopsi, dan tinggal dalam sebuah rumah tangga. Menurut Horton (1984 halm,287) keluarga adalah suatu sistem norma dan tata cara yang diterima untuk menyelesaikan sejumlah tugas penting.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa anggota yang terkumpul dan tinggal di satu tempat dibawah satu atap dengan keadaan saling ketergantungan.

2.1.4.4 Ciri-ciri Keluarga

Ciri-ciri umum keluarga antara lain seperti yang telah dikemukakan oleh Mac Iver dan Charles H dalam Khairuddin (2002 halm,15) meliputi: a) keluarga merupakan hubungan perkawinan, b) berbentuk perkawinan atau susunan kelembagaan yang berkenaan dengan hubungan perkawinan yang sengaja dibentuk dan di pelihara, c) suatu sistem tata nama termasuk bentuk perhitungan garis keturunan, d) ketentuam-ketentuan ekonomi yang dibentuk oleh anggota-anggota kelompok yang mempunyai ketentuan khusus terhadap kebutuhan-kebutuhan ekonomi yang berkaitan dengan kemampuan untuk mempunyai keturunan dan membesarkan anak, e) merupakan tempat tinggal bersama, rumah atau rumah tangga yang tidak mungkin menjadi terpisah terhadap kelompok keluarga.

Sedangkan menurut Khairuddin (2002 halm,13), ciri-ciri keluarga meliputi: a) kebersamaan, diantara bentuk-bentuk organisasi sosial yang lain keluarga merupakan bentuk yang paling universal, yang dapat di temukan dalam semua masyarakat, b) Dasar-dasar emosional, hal ini didasarkan pada suatu dorongan yang mendasar, seperti perkawinan, menjadi ayah, dan perhatian orang tua, c) Pengaruh perkembangan, hal ini membentuk karakter individu melalui pengaruh kebiasaan-kebiasaan organisasi maupun mental, d) Ukuran yang terbatas, keluarga dibatasi oleh kondisi biologis, e) tanggung jawab para anggota, keluarga memiliki tuntutan yang lebih besar dan kontinu asosiasi-asosiasi lainnya, f) aturan kemasyarakatan, masyarakat diatur oleh pengaturan yang sah dan kaku dalam hal yang tahu, g) sifat kesetaraan, keluarga merupakan suatu yang demikian permanen dan universal dan sebagai asosiasi merupakan organisasi kelompok disekitar keluarga yang menuntut perhatian khusus.

Berdasarkan ciri-ciri tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri keluarga antara lain: a) adanya kebersamaan, b) dasar-dasar emosional, c) pengaruh perkembangan, d) ukurannya terbatas, e) posisi inti dalam struktur sosial, f) tanggung jawab anggota keluarga, g) aturan kemasyarakatan, h) memiliki sifat kekekalan dan kesementaraan.

2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan

Hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah :

1. Penelitian yang relevan dilakukan oleh Silvia Anggraini (2020) yang berjudul “Upaya Kelompok Wanita Tani (KWT) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Pekarangan Rumah di Kampung Sinar Harapan Kelurahan Rajabasa Jaya Bandar Lampung” berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan kelompok wanita tani harapan kita memberikan hasil yang baik,hal ini dilihat dari ibu-ibu yang tertarik dalam mengikuti kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan dan mereka sadar akan pentingnya kesehatan dengan melakukan penanaman yang hasilnya dapat meningkatkan gizi dan menyehatkan tanpa pengawet, serta kegiatan pemberdayaan melalui pemanfaatan pekarangan ini menjadikan lebih mandiri hal ini dilihat dari

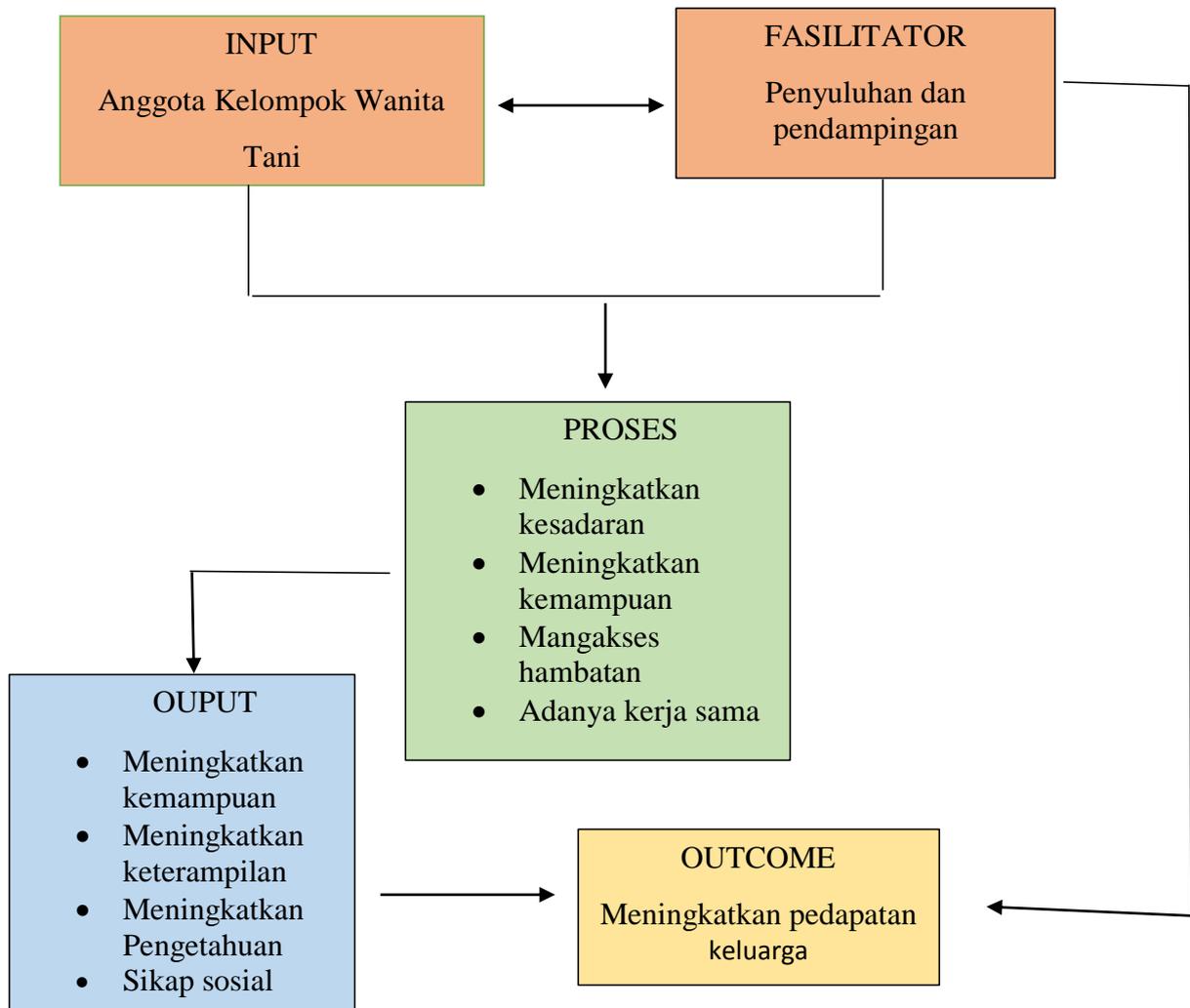
kemampuan yang menghasilkan kreativitas dan ide-ide baru yang menciptakan peluang usaha untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.

2. Penelitian yang relevan dilakukan oleh Armudidin, Muhamad Iqbal (2018) yang berjudul “Pemanfaatan Lahan Pekarangan Sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Keluarga di Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa” berdasarkan hasil penelitian, penggunaan lahan pekarangan selama ini di Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa sudah dimanfaatkan sejak dari dulu, karena dianggap merupakan tempat bertani sampingan selain disawah juga merupakan hobi dan kebiasaan bagi mereka.
3. Penelitian yang relevan dilakukan oleh Ahmad Mustanir yang berjudul “Pemberdayaan Perempuan Anggota Badan Usaha Milik Desa Dengan Pemanfaatan Lahan Kebun Bibit Desa” berdasarkan hasil penelitian mewujudkan kemandirian ekonomi desa melalui pendamping perempuan anggota Badan Usaha Milik Desa agar terjadi pemahaman akan pentingnya manajemen organisasi dan administrasi yang tertib dan teratur, pentingnya berorganisasi dan mengatur waktu untuk membantu perekonomian keluarganya melalui pemahaman budidaya pertanian yang lebih baik serta pelaksanaan PRA dengan alat kaji permasalahan budidaya pertanian dan Transect untuk lokasi Kebun Bibit Desa.
4. Penelitian yang relevan dilakukan oleh Putri Indah Arisandi (2020) yang berjudul “Efektifitas Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Kelompok Wanita Tani Dalam Peningkatan Penghasilan Keluarga Ditinjau Perspektif Ekonomi Islam” berdasarkan hasil penelitian Putri Ayu mampu berperan untuk meningkatkan penghasilan melalui kegiatan pengolahan hasil pertanian dan ternak hewan. Kelompok wanita tani mampu menjadi wadah untuk meningkatkan penghasilan, wadah untuk bekerjasama didalam usaha-usaha kesejahteraan, dan wadah untuk meningkatkan produktivitas.
5. Penelitian yang relevan dilakukan oleh Hesti Kusuma yuwi citra, Yusuf Adam Hilman, yang berjudul “Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok Wanita Tani Di Desa Karangpatihan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo” berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan kegiatan KRPL kelompok tani di Desa

Karangpahitan Kecamatan Pulung , beberapa bulan yang sudah berjalan dengan baik, namun lambat laun kegiatan kelompok wanita tani tidak seintan dulu, ditambah lagi kejenuhan ibu-ibu dalam memelihara pekarangnya. Hal ini disebabkan karena kesibukan untuk mengelola lahan pribadi (sawah atau tegal) yang menurut mereka lebih menguntungkan. Ditambah lagi dengan kurangnya keuletan dari ibu-ibu tersebut. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa tanaman khususnya sayur itu membutuhkan pemeliharaan yang baik. Melemahnya pendampingan dari pihak terkait juga turut membuka kegiatan kelompok tidak berkembang. Jaringan kerja sama antar kelompok KWT juga membuat KWT kurang berkembang.

2.3 Kerangka Konseptual

Peneliti ingin melakukan penelitian bagaimana pemberdayaan perempuan melalui program pemanfaatan pekarangan rumah dalam meningkatkan pendapatan keluarga di Kelurahan Setiawangi, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya. Berikut ini gambaran kerangka konseptual dari peneliti :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Pemberdayaan perempuan melalui kegiatan pemanfaatan pekarangan rumah pada kelompok wanita tani batu angel yaitu dengan melakukan pemberdayaan perempuan dengan cara memanfaatkan pekarangan-pekarangan rumah yang ditanami tanaman sayuran, dalam upaya mengurangi biaya pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga kelompok. Proses pada pelaksanaan ini melibatkan penyuluh dari dinas pertanian dengan cara pendampingan pada kelompok. Dalam proses pemberdayaan perempuan ini penyuluh kelompok wanita tani ini mengacu pada 4 aspek dalam pemberdayaan yaitu: meningkatkan kesadaran,

meningkatkan kemampuan, mengakses hambatan, dan adanya kerja sama. Dengan adanya penyuluhan ini penyuluh memberikan materi, pemaparan metode, teknik penanaman dan memberikan sarana dan prasarana. Dari program ini akan memberikan outcome atau efek jangka panjang dalam meningkatkan pendapatan keluarga kelompok.

2.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada kerangka konseptual diatas maka dapat diajukan pertanyaan penelitian, yang dapat diharapkan mampu menjawab yang diteliti yaitu “Bagaimana pemberdayaan perempuan dan peningkatan pendapatan melalui program pemanfaatan perkarangan rumah di Kelompok Wanita Tani Batu Anggel, di Kelurahan Setiawargi “?